



TAJUK RENCANA

TPST Piyungan

SAMPAH di berbagai kota akhir-akhir ini selalu menjadi persoalan setiap tahun. Apalagi di kota besar seperti Jakarta yang sudah tidak lagi punya lahan pembuangan sampah. Di Yogyakarta yang relatif masih punya lahan pembuangan juga sering dicekoki persoalan sampah.

Seperti terjadi beberapa hari terakhir ini, muncul persoalan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, bahkan sampai ada blokade yang dilakukan warga yang tergabung dalam wadah 'Banyak Menolak, Banyak Melawan'. Meskipun akhirnya blokade tersebut dibuka kembali setelah ada koordinasi antara Pemerintahan Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, dan Pemda DIY.

Pembukaan akses TPST dilakukan setelah kesepakatan dengan pemerintah, tuntutan warga sudah dijanjikan solusi. Khusus mengenai solusi yang dijanjikan pemerintah, itupun masih harus dikawal oleh masyarakat yang tergabung dalam wadah 'Banyak Menolak, Banyak Melawan'. Jika solusi tidak terwujud, warga mengancam akan melakukan komplain kepada pemerintah bahkan tidak menutup kemungkinan 'blokase' lagi.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama warga dengan Sekda DIY, sudah disepakati pembukaan blokade. Hal itu dikarenakan pemerintah sudah berjanji bahwa tahun 2025 TPST Piyungan stop aktivitas pembuangan sampah. Tidak ada lagi transisi, tidak ada pelebaran. Tahun 2025 sudah akan stop pembuangan sampah. Tahun 2025 itu akan ada pengolahan sampah yang dibangun oleh pemerintah.

Sampah ibarat api yang selalu memunculkan polusi berupa asap. Kalau diibaratkan air, selalu memunculkan lumpur dan lingkungan yang kotor. Karena itu ada ungkapan, "ke-

cil jadi kawan, besar jadi lawan". Api atau air yang kecil sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tetapi kalau api besar atau air besar akan memunculkan bencana bagi manusia. Itu pula karakter sampah, yang selalu menimbulkan lingkungan kumuh dan bahu menyengat memuakkan.

Seperti dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji, Pemda DIY memastikan tidak akan memperluas zona pembuangan sampah mendekati pemukiman penduduk. Sebab menurutnya, saat ini Pemda DIY sedang melakukan pembebasan lahan yang difokuskan untuk pengadaan teknologi pengelolaan sampah. Pengadaan teknologi pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Menurut Sekda, Pemda DIY melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY telah mengupayakan pemadatan sampah di zona A dan B untuk memperpanjang daya tampung. Setelah dipadatkan, bisa turun sekitar 4 meter dan mungkin bisa bertambah daya tampungnya sekitar 1,5 bulan. Zona transisi akan digunakan kalau kapasitas zona A dan B benar-benar sudah tidak memadai.

Untuk mengatasi persoalan TPST Piyungan, Pemda DIY juga akan melakukan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini prosesnya masih dalam tahap penyiapan studi kelayakan.

Solusi atau titik temu mengatasi persoalan TPST Piyungan tampaknya sudah akan dapat diwujudkan. Sekarang, tinggal bagaimana realisasinya. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005